

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia konstruksi terdapat berbagai macam permasalahan yang kompleks dan perlu ditangani secara detail. Salah satunya bagaimana menghasilkan konstruksi sesuai standar mutu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan standar manajemen mutu telah menjadi isu utama, khususnya standarisasi system manajemen mutu (SMM). Dalam hal ini diperlukan peran pemerintah dalam bentuk kebijakan khusus untuk mengatur penerapan sistem manajemen mutu (SMM) (Asa,dkk,2009)

Menteri Pekerjaan Umum (2009) sebelumnya telah menerbitkan peraturan tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum, yang telah mengacu pada Standar Sistem Manajemen Mutu Internasional, yaitu SNI ISO 9001 yang merupakan sarana atau alat untuk dapat mencapai tujuan mutu agar dapat diimplementasikan pada pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direktorat Jendral Bina Marga, sehingga dapat menghasilkan produk yang bermutu atau jasa yang memuaskan pelanggan, maka akan mendatangkan manfaat yang lebih bagi organisasi, manfaat yang secara umum yang dapat dirasakan secara langsung adalah terjadinya peningkatan aspek pelayanan publik, sebagai dampak positif dari kepuasan pelanggan/pemangku kepentingan. Setiap pelaksanaan proyek yang dimaksud adalah hasil akhir yang ingin dicapai adalah mutu pekerjaan yang baik, ini sekaligus merupakan suatu hal yang menunjukkan keberhasilan pemilik proyek (owner) dan penyedia

jasa (konsultan dan kontraktor) dalam mengimplementasikan sistem manajemen mutu (SMM).

Menteri Pekerjaan Umum (2009) juga menjelaskan pada pelaksanaan kegiatan proyek konstruksi yang baik pemilik proyek (owner) maupun penyedia jasa (konsultan dan kontraktor) untuk mengimplementasikan sistem manajemen mutu (SMM) harus memiliki dokumen rencana mutu.

Dokumen Rencana Mutu terdiri dari :

1. Rencana mutu unit kerja (RMU), merupakan dokumen rencana penetapan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program tahunan berjalan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon I sampai dengan Eselon II dalam rangka menjamin mutu;
2. Rencana mutu pelaksanaan (RMP), merupakan dokumen sistem manajemen mutu (SMM) Pelaksanaan yang disusun oleh Kepala satuan kerja (Satker), Satuan kerja non vertical tertentu (SNVT), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka menjamin mutu;
3. Rencana Mutu Kontrak (RMK), merupakan dokumen sistem manajemen mutu (SMM) yang disusun oleh Penyedia Barang/Jasa untuk setiap kontrak pekerjaan dalam rangka menjamin mutu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pekerjaan.

Dokumen rencana mutu berisi prosedur dan sumber daya yang Diperlukan harus ditetapkan oleh siapa dan kapan pada suatu proyek, hasil pekerjaan, proses atau kontrak tertentu. Dokumen ini merupakan acuan dan alat control terhadap pelaksanaan pekerjaan dalam menerapkan standar mutu.

Salah satu penerapan dari Sistem Manajemen Mutu (SMM) ini adalah dengan menyusun suatu RMK pada suatu proyek jasa konstruksi yang disusun oleh pihak kontraktor atau penyedia jasa. Dokumen RMK diatur oleh Standar PU yaitu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM).

Adanya dokumen RMK ini, dapat menjadi acuan dalam mengendalikan mutu sehingga dapat meminimalisir adanya kegagalan dalam proyek jasa konstruksi agar didapatkan mutu sesuai dengan rencana. Dalam skripsinya, Ahzan (2014) menyebutkan bahwa konsultan pengawas pada proyek tersebut menggunakan form ceklis yang berbeda dari Instruksi Kerja Pengawasan Pembangunan Jembatan Dirjen Bina Marga, sehingga hal ini mempengaruhi kualitas/mutu dari proyek itu sendiri. Dari pernyataan tersebut, dimana instruksi kerja merupakan bagian dari dokumen RMK, yang mengartikan bahwa dokumen RMK mampu menjadi acuan bagus tidaknya pekerjaan di lapangan. Sehubungan dengan hal di atas maka dilakukan penelitian mengenai penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) berdasarkan penerapan dokumen RMK oleh penyedia jasa di bandingkan dengan RMK Standar PU.

Untuk mengetahui kelengkapan dokumen RMK yang diterapkan kontraktor atau penyedia jasa terhadap proyek jasa konstruksi yang dikerjakan dengan dokumen RMK Standar PU , maka dilakukan studi kasus pada tiga proyek yang selanjutnya dilakukan analisa perbandingan.

Proyek tersebut yaitu :

1. Proyek Perservasi Jalan BTS-Riau
2. Proyek Paket Pemeliharaan Berkala Jembatan Baso- BTS Riau

3. Proyek Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Sipora di Kab. Kepulauan Mentawai - Lanjutan

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi kelengkapan dokumen RMK yang diterapkan kontraktor atau penyedia jasa Proyek Preservasi Jalan Baso-BTS Riau, Proyek Paket Pemeliharaan Jembatan Baso – BTS Riau dan Proyek Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Sipora di Kab. Kepulauan Mentawai - Lanjutan terhadap RMK Standar PU.
2. Untuk Membandingkan dokumen RMK yang diterapkan kontraktor atau penyedia jasa Proyek Preservasi Jalan Baso-BTS Riau, Proyek Paket Pemeliharaan Jembatan Baso – BTS Riau dan Proyek Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Sipora di Kab. Kepulauan Mentawai - Lanjutan dengan Dokumen RMK Standar PU.

Manfaat Penelitian yaitu Sebagai bahan evaluasi bagi pihak kontraktor atau penyedia jasa dalam penerapan Dokumen RMK dan sebagai acuan pada proyek pembangunan berikutnya.

1.3 Batasan Masalah

Agar tidak terjadinya penelitian yang terlalu luas, maka penulis membatasi penelitian hanya berkonsentrasi pada Kelengkapan dokumen RMK yang di terapkan Kontraktor atau penyedia jasa Proyek Preservasi jalan Baso-BTS Riau, Proyek Paket Pemeliharaan Jembatan Baso-BTS

Riau dan Proyek Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku di Kab. Kepulauan Mentawai – Lanjutan yang dibandingkan dengan peraturan yang berlaku dalam Standar PU yaitu Permen PU No 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Surat Edaran Menteri No 15/SE/M/2019 tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini mengacu pada peraturan penulisan yang terdapat pada buku Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas tahun 2017.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, tujuan penulisan, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi studi literatur dan landasan teori tentang Pengertian Mutu/Kualitas, Sistem Manajemen Mutu (SMM), Manajemen Kualitas (Quality Management), Rencana Mutu, Rencana Mutu Kontrak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang metode dan langkah-langkah kerja yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berisikan analisa terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh dan membandingkan hasil-hasil tersebut.

BAB V KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

